

Penganggaran Publik dan Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Daerah

Faesal Gibran¹, Sayyid Ahmad Walmukmin², Irawati Ningsih³, Rosiah⁴, Lila Alwyah⁵

^{1,2,3,4,5} Akademi Bisnis Lombok

E-mail: faesalgibranakunperibadi@gmail.com

Abstract:

Public budgeting is an important process in managing a country's finances to meet the needs of the people. However, corruption often affects this process, reducing the effectiveness of development efforts and threatening public trust. In local government, the complexity of regional autonomy increases the risk of corrupt practices such as inflated budgets and embezzlement, which cause economic losses. This study aims to examine the impact of corruption on public budgeting and the efforts to prevent it in local governments. The research uses a qualitative literature-based approach, focusing on identifying best practices and policy recommendations. The research method involves collecting and analyzing themes from literature from trusted sources, such as academic journals, reports from international organizations, and government documents from 2017 to 2024. The findings show that the main risk of corruption is due to a lack of transparency and supervision, while prevention efforts like e-budgeting, independent audits, and community participation have proven effective in reducing corruption risks, although challenges such as nepotism and limited capacity still exist. The conclusion highlights the importance of integrating information technology, strengthening accountability, and policy reform to improve local government administration, which contributes to sustainable development and increases public trust. This study fills a gap in literature-based research and recommends a holistic approach to preventing corruption.

Keywords: *Corruption Prevention, Local Government, Public Budgeting*

Abstrak:

Penganggaran publik merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun sering kali Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak korupsi terhadap penganggaran publik serta upaya pencegahannya di pemerintahan daerah terpengaruh oleh korupsi yang mengurangi efektivitas pembangunan dan mengancam kepercayaan publik. Di pemerintahan daerah, kompleksitas otonomi regional meningkatkan risiko praktik koruptif seperti mark-up anggaran dan penggelapan dana, yang menyebabkan kerugian ekonomi.. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur, dengan fokus pada identifikasi praktik terbaik dan rekomendasi kebijakan. Metode penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis tema dari literatur yang berasal dari sumber terpercaya, seperti jurnal akademik, laporan organisasi internasional, serta dokumen pemerintah dari tahun 2017 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko korupsi utamanya berkaitan dengan kurangnya transparansi dan pengawasan, sedangkan upaya pencegahan seperti e-budgeting, audit independen, dan partisipasi masyarakat terbukti efektif dalam mengurangi risiko korupsi, meskipun masih terdapat tantangan seperti nepotisme dan

keterbatasan kapasitas. Kesimpulan menekankan pentingnya integrasi teknologi informasi, penguatan akuntabilitas, serta reformasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan kajian literatur dan merekomendasikan pendekatan holistik dalam pencegahan korupsi.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pencegahan Korupsi, Penganggaran Publik

A. Pendahuluan

Penganggaran publik merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan negara yang memiliki peran kunci dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, sering kali proses ini terkena pengaruh korupsi yang dapat mengurangi keefektifan pembangunan. Korupsi dalam penganggaran publik tidak hanya merugikan perekonomian nasional, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Berdasarkan berbagai studi, korupsi dapat menyebabkan pemborosan anggaran (Transparency International, 2019; World Bank, 2020; OECD, 2021). Upaya pencegahan korupsi melalui penganggaran yang transparan dan akuntabel menjadi prioritas global, terutama dalam konteks reformasi tata kelola pemerintahan.

Di tingkat pemerintahan daerah, penganggaran publik semakin kompleks karena melibatkan otonomi regional yang rentan terhadap praktik koruptif seperti mark-up anggaran atau penggelapan dana. Pemerintahan daerah bertanggung jawab atas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetapi keterbatasan kapasitas pengawasan dan regulasi sering memicu kasus korupsi. Berdasarkan penelitian terkini, di Indonesia, korupsi di pemerintahan daerah menimbulkan kerugian negara, dengan contoh kasus seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan (KPK, 2018; BPK, 2021; ICW, 2022). Upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah mencakup implementasi sistem e-budgeting dan penguatan peran masyarakat sipil, meskipun tantangan seperti nepotisme dan kurangnya koordinasi antarlembaga masih menjadi hambatan utama.

Meski berbagai inisiatif telah dilakukan, seperti reformasi penganggaran berbasis kinerja dan audit independen, masih terdapat kekurangan dalam efektivitas upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. Hasil kajian dalam berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya integrasi teknologi informasi dalam penganggaran meningkatkan risiko korupsi (Aspinall & Sukmajati, 2019). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam mengintegrasikan penganggaran publik dengan strategi pencegahan korupsi yang adaptif terhadap kondisi lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penganggaran publik dan upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah dengan metode kualitatif berbasis *library research*, fokus pada identifikasi praktik terbaik dan rekomendasi kebijakan. Dengan mengkaji literatur terkini, diharapkan penelitian ini dapat mengisi celah pengetahuan mengenai efektivitas mekanisme pencegahan korupsi dalam penganggaran daerah, yang berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Mietzner, 2018; Pratikno, 2021; Widodo, 2023).

B. Tinjauan Pustaka

Pengertian dan Peran Anggaran Publik

Anggaran publik didefinisikan sebagai proses perencanaan, alokasi, dan pengawasan sumber daya keuangan negara guna mencapai tujuan pembangunan. Proses ini melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas (World Bank, 2018; OECD, 2020; IMF, 2022). Anggaran publik memainkan peran penting dalam menentukan penyediaan layanan publik, seperti infrastruktur dan pendidikan, namun kompleksitas otonomi daerah sering kali menyebabkan tantangan dalam pengelolaannya Santoso (2021) menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pembangunan yang signifikan, sebagaimana dilaporkan dalam berbagai penelitian terdahulu di tingkat daerah (Transparency International, 2019; BPK, 2021; ICW, 2022).

Korupsi dalam Anggaran Publik

Korupsi dalam anggaran publik mencakup tindakan seperti mark-up anggaran, penggelapan dana, dan nepotisme, yang kerap menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk pemborosan anggaran nasional di negara berkembang (Transparency International, 2019; World Bank, 2020; OECD, 2021). Di tingkat pemerintahan daerah, korupsi sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa serta pengalokasian dana transfer, dengan kasus di Indonesia mencapai kerugian triliunan rupiah akibat lemahnya pengawasan (KPK, 2018; BPK, 2021; ICW, 2022). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor seperti rendahnya kapasitas institusi serta kurangnya transparansi meningkatkan risiko korupsi serta kurangnya transparansi meningkatkan risiko korupsi, yang berdampak pada ketimpangan regional dan kepercayaan publik (Aspinall & Sukmajati, 2019).

Upaya Pencegahan Korupsi dalam Anggaran Publik

Upaya mencegah korupsi dalam anggaran publik mencakup implementasi mekanisme seperti e-budgeting, audit independen, dan partisipasi masyarakat, yang telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko korupsi di berbagai konteks (Transparency International, 2019; OECD, 2020; IMF, 2022). Di tingkat pemerintahan daerah, upaya reformasi anggaran berbasis teknologi informasi serta penguatan peran lembaga antikorupsi seperti KPK telah menunjukkan hasil positif berupa penurunan tingkat risiko korupsi di beberapa wilayah (KPK, 2018; BPK, 2021; ICW, 2022). Namun, tantangan seperti nepotisme dan koordinasi antarlembaga masih menghambat efektivitas pencegahan, seperti yang diidentifikasi dalam studi yang menyarankan pendekatan holistik dalam integrasi pencegahan korupsi dengan anggaran publik (Aspinall & Sukmajati, 2019).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan untuk menganalisis penganggaran publik dan upaya mencegah korupsi di pemerintahan daerah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual mengenai fenomena korupsi serta kebijakan penganggaran melalui analisis terhadap berbagai literatur dan dokumen kebijakan tanpa terbatas oleh akses langsung ke lapangan (Creswell & Poth, 2017; Flick, 2018; Silverman, 2020).

Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif, dengan menggunakan data sekunder berupa jurnal akademik, laporan organisasi internasional, dan dokumen resmi pemerintah. Literatur yang digunakan dikumpulkan dari berbagai basis data seperti Google Scholar dan JSTOR, serta situs resmi lembaga terkait seperti KPK dan BPK, dengan kriteria publikasi relevan pada periode tahun 2017 sampai 2023. Kata kunci yang digunakan meliputi "penganggaran publik", "pencegahan korupsi", dan "pemerintahan daerah" (World Bank, 2020; OECD, 2021; IMF, 2022).

Analisis data dilakukan secara tematik, yakni dengan mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama, menyintesis informasi untuk mengidentifikasi pola dan kelemahan, serta melakukan interpretasi terhadap temuan untuk menghasilkan implikasi dan rekomendasi kebijakan. Untuk menjaga keandalan hasil, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari studi internasional dan penelitian dalam negeri (Transparency International, 2019; BPK, 2021; ICW, 2022).

Secara keseluruhan, literatur terkini menegaskan pentingnya integrasi penganggaran publik dengan strategi pengendalian korupsi yang adaptif. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam studi empiris khusus mengenai pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis praktik terbaik dan merekomendasikan kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola publik (Mietzner, 2018; Widodo, 2023). Dengan menggunakan metode kualitatif *library research*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam upaya reformasi penganggaran di daerah (Transparency International, 2019; BPK, 2021; ICW, 2022).

D. Hasil Penelitian

Analisis Penganggaran Publik di Pemerintahan Daerah

Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan metode riset di perpustakaan, hasil analisis menunjukkan bahwa penganggaran publik di pemerintahan daerah tidak hanya digunakan untuk menyalurkan dana, tetapi juga sebagai alat penting untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penganggaran daerah umumnya fokus pada bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi. Namun, otonomi daerah juga membuat penganggaran lebih rumit karena perbedaan kemampuan keuangan, struktur organisasi, dan cara pengelolaan antar daerah (Rimawan & Aryani, 2019; Lathifah et al., 2024). Penelitian juga mengungkapkan bahwa perbedaan dalam perencanaan dan penganggaran bisa memengaruhi seberapa efektif dana digunakan, terutama di daerah yang manajemen keuangannya masih kurang matang (Lathifah et al., 2019).

Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa daerah melakukan perbaikan dalam mengelola dana, terutama dengan memanfaatkan dana yang diberikan pusat dan meningkatkan partisipasi pihak-pihak yang terkait dalam proses penganggaran. Studi menunjukkan bahwa jika lembaga seperti DPRD dan masyarakat terlibat aktif, maka anggaran bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (World Bank, 2020; OECD, 2021). Namun, masih ada tantangan besar, seperti kurangnya keterampilan teknis aparatur dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang mengakibatkan penggunaan dana yang tidak efisien dan boros. Laporan dari BPK dan ICW menunjukkan bahwa masalah ini sering terjadi di berbagai provinsi dan kabupaten, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah (BPK, 2021; ICW, 2022).

Identifikasi Risiko Korupsi dalam Penganggaran

Hasil penelitian kualitatif dengan metode riset di perpustakaan menunjukkan bahwa korupsi dalam penganggaran daerah sering terjadi saat perencanaan dan pelaksanaan dana, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian menunjukkan bahwa praktik seperti menaikkan anggaran, menentukan pemenang tender secara tidak transparan, serta menggelapkan dana masih terjadi secara luas dan menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar setiap tahunnya. Laporan KPK menyatakan bahwa sebagian besar kasus korupsi di tingkat daerah terkait langsung dengan pengelolaan anggaran, dengan bidang pengadaan sebagai daerah paling rentan karena kurangnya pengawasan dan transparansi (KPK, 2018; Transparency International, 2019).

Analisis berdasarkan berbagai sumber juga menunjukkan bahwa korupsi dalam penganggaran tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan menurunkan kualitas layanan publik. Penelitian kualitatif menemukan bahwa daerah dengan tingkat nepotisme tinggi cenderung mengalami penyimpangan anggaran yang berulang, terutama ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif. Hal ini memperkuat temuan bahwa korupsi dalam anggaran bersifat sistemik dan dipengaruhi oleh faktor politik lokal, budaya organisasi, serta kurangnya penegakan hukum (Aspinall & Sukmajati, 2019; BPK, 2021).

Efektivitas Upaya Pencegahan Korupsi

Dari hasil analisis yang mendalam terhadap literatur, penelitian ini menemukan bahwa berbagai upaya untuk mencegah korupsi telah diterapkan di daerah-daerah dengan hasil keberhasilan yang berbeda. Sistem *e-budgeting*, peningkatan audit yang independen, serta transparansi informasi publik terbukti mampu mengurangi risiko penyimpangan dalam penggunaan anggaran, terutama di daerah yang menggabungkan teknologi informasi dengan pengawasan publik. Literatur juga menekankan bahwa peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan (OECD, 2020; IMF, 2022; ICW, 2022).

Dari studi kualitatif perbandingan, tampak bahwa negara-negara berkembang seperti Filipina berhasil mengendalikan korupsi lewat penganggaran yang melibatkan masyarakat. Namun, literatur juga menunjukkan bahwa keberhasilan strategi serupa di Indonesia sangat bergantung pada peningkatan kapasitas lembaga dan konsistensi dalam penerapan hukum. Peran KPK dianggap sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan penganggaran baru tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar efektif untuk mencegah korupsi (World Bank, 2020; Transparency International, 2019).

Pola dan Kesenjangan dari Analisis Literatur

Dari sintesis tema dalam penelitian literatur, terlihat bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran publik berkorelasi negatif dengan tingkat korupsi di daerah. Daerah yang menerapkan sistem anggaran terbuka dan mekanisme pengawasan yang kuat cenderung memiliki risiko korupsi yang lebih rendah. Namun, literatur juga menunjukkan adanya ketidakmerataan yang signifikan di daerah yang mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, sehingga kebijakan pencegahan korupsi tidak berjalan optimal (Aspinall & Sukmajati, 2019; Widodo, 2023).

Selanjutnya, penelitian kualitatif berbasis literatur menunjukkan bahwa pendekatan efektif dalam mencegah korupsi memerlukan strategi yang menyeluruh,

mencakup reformasi lembaga, pendidikan bagi pegawai, dan penggunaan teknologi. Meskipun beberapa penelitian telah membahas isu anggaran dan korupsi secara umum, masih ada keterbatasan dalam penelitian empiris yang secara spesifik membahas dinamika anggaran daerah di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menggarisbawahi perlunya memperluas penelitian berbasis literatur untuk mengisi celah pengetahuan serta memperkuat rekomendasi kebijakan yang relevan dengan konteks lokal (Mietzner, 2018; BPK, 2021).

E. Pembahasan

Interpretasi Hasil dalam Konteks Teori dan Praktik

Mereview hasil penelitian kualitatif yang berbasis pada studi pustaka menunjukkan bahwa penganggaran publik di pemerintahan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan sumber daya, tetapi juga sebagai cara strategis untuk mencegah korupsi. Dari sudut pandang teori *good governance*, transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran merupakan kunci utama untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Temuan penelitian ini memperkuat bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja secara teori dan praktis dapat meningkatkan efisiensi dan pengawasan, meskipun tingkat keberhasilannya tergantung pada kemampuan lembaga dan sumber daya manusia di tingkat daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari lembaga pengawas yang merasa bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan daerah dan negara, sehingga membutuhkan kebijakan yang lebih sistematis (Transparency International, 2019; BPK, 2021; ICW, 2022).

Implikasi Kebijakan dan Praktik

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan yang menggabungkan teknologi digital, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat memiliki dampak penting dalam mencegah korupsi di pemerintahan daerah. Penggunaan sistem *e-budgeting* dan mekanisme pengawasan publik terbukti bisa mengurangi risiko penyimpangan anggaran, terutama di daerah yang mampu menggunakan teknologi informasi secara konsisten. Dalam praktiknya, pemerintah daerah dapat menyamakan model penganggaran digital yang telah berhasil di beberapa wilayah sebagai bagian dari perbaikan sistem keuangan daerah. Namun, tantangan struktural seperti nepotisme dan intervensi politik lokal masih memerlukan strategi tambahan, seperti penguatan audit mandiri dan peran lembaga pengawas seperti KPK. Pendekatan yang menyatukan reformasi lembaga, teknologi, dan partisipasi publik dianggap penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (KPK, 2018; Aspinnall & Sukmajati, 2019; OECD, 2020).

Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Lanjutan

Meskipun pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka memungkinkan analisis konseptual dan kebijakan secara mendalam, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ketergantungan pada data sekunder yang belum sepenuhnya mewakili kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu ditafsirkan secara hati-hati dan dilengkapi dengan pendekatan metodologi lain. Penelitian lanjutan disarankan menggabungkan metode kualitatif dengan analisis kuantitatif untuk mengukur risiko korupsi secara lebih objektif, atau melakukan studi langsung di pemerintahan daerah tertentu untuk memvalidasi temuan. Penguatan triangulasi sumber dan metode juga

merupakan rekomendasi penting untuk meminimalkan bias dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, sesuai dengan standar penelitian kualitatif (Creswell & Poth, 2017; Flick, 2018; Silverman, 2020; World Bank, 2020; IMF, 2022; Widodo, 2023).

Kontribusi Penelitian terhadap Pengetahuan

Penelitian ini memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis di bidang penganggaran publik dan pencegahan korupsi. Penelitian ini membantu mengisi kekurangan informasi mengenai cara pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam anggaran, penganggaran yang berbasis kinerja, serta penggunaan teknologi informasi sangat efektif. Hasil ini dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi nyata dan mampu beradaptasi. Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa anggaran publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi penting dalam upaya menekan korupsi. Hal ini memiliki dampak positif terhadap stabilitas ekonomi, perkembangan sosial, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan (Transparency International, 2019; BPK, 2021; ICW, 2022; Mietzner, 2018).

F. Kesimpulan

Kesimpulan artikel ini adalah bahwa penganggaran publik di pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat, tetapi masih sangat rentan terhadap praktik korupsi. Faktor utama yang menyebabkan korupsi dalam penganggaran adalah rendahnya transparansi, lemahnya pengawasan, kurangnya akuntabilitas, serta adanya nepotisme dan intervensi politik lokal. Dampak dari korupsi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas layanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui penerapan sistem e-budgeting, audit independen, keterbukaan informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta koordinasi antarlembaga sangat diperlukan agar pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif dan bersih. Dengan demikian, reformasi penganggaran yang transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta meningkatnya kepercayaan publik.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2019). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). (2021). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester*. Jakarta: BPK RI.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). London: SAGE Publications.

- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Laporan tahunan tren korupsi di Indonesia*. Jakarta: ICW. <https://antikorupsi.org/id/publikasi/laporan-tahunan>
- International Monetary Fund. (2022). *Fiscal transparency handbook*. Washington, DC: IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/FT-Handbook>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2018). *Laporan tahunan KPK 2018*. Jakarta: KPK RI.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 577-584.
- Mietzner, M. (2018). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 50(3), 399–417.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Government at a glance 2020*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/gov/government-at-a-glance/>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Fighting corruption and promoting integrity in public procurement*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement/>
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287-295.
- Silverman, D. (2020). *Doing qualitative research* (6th ed.). London: SAGE Publications.
- Transparency International. (2019). *Corruption perceptions index 2019*. Berlin: Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2019>
- Widodo, J. (2023). *Tata kelola pemerintahan daerah: Tantangan korupsi dan solusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- World Bank. (2020). *Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption*. Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org/ext/en/development-topics>